

permasalahan politik global yang menuntut keterlibatan bersama seluruh negara anggotanya.

Menyadari posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dalam percaturan politik internasional menjadikan setiap sikap dan tindakan politiknya mempunyai implikasi besar bagi dunia internasional termasuk dalam PBB. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tema tersebut dalam skripsi ini dengan judul:

“Dominasi Amerika Serikat Terhadap Proses Reformasi PBB ”

B. Latar Belakang Masalah

Penolakan Amerika Serikat atas rancangan naskah hasil akhir konferensi tingkat tinggi dunia yang disampaikan tiga pekan sebelum penyelenggaraan KTT 6 September 2005, mengejutkan sekaligus mengecewakan banyak pihak hampir seluruh isi naskah itu telah disepakati sebahagian besar anggota perSerikatan bangsa-bangsa (PBB). Sebagai Negara adidaya paling dominan bukan sekali ini saja Amerika Serikat ingin mengatur segala urusan pergaulan internasional dengan mendominasi berbagai pertemuan internasional maupun regional. Setidaknya jika diikuti proses didalam negeri Amerika Serikat sendiri, penolakan atas beberapa butir usulan reformasi PBB bisa dilakukan sejak bulan juli 2005 ketika kongres dan pemerintah George W Bush sudah mempunyai bahan pengkajian tentang

perangkat yang efektif untuk memerangi teror, mencegah senjata pemusnah massal jatuh ketangan yang salah. Ketiga, sebuah strategi dan tindakan tindakan spesifik untuk peningkatan kemampuan menghentikan genosida, pembunuhan massal, pelanggaran HAM, termasuk tindakan segera terhadap Darfur (Sudan). Keempat, peningkatan bantuan jumlah bantuan dalam jumlah besar sebagai prioritas global untuk mengangkat negara sedang berkembang terbebas dari kemiskinan. Kelima, peningkatan kemampuan operasi penjaga perdamaian.

Terkait dengan reformasi dewan keamanan (DK), disebutkan bahwa gugus tugas Amerika Serikat tidak bisa menyepakati mengenai rincian perluasan DK, tetapi menekankan efektifitas dan tidak mengurangi efesiensi dan kemampuan DK bertindak sesuai dengan piagam PBB. Begitu juga dorongan sekjen PBB sebagaimana target dalam Millennium Development Goals (MDGs), agar negara-negara donor mencapai tingkatan pemberian bantuan 0,7 persen dari pendapatan kotor per kapita (GDP)-nya. Gugus tugas AS juga menolaknya dan menyetujui bahwa negara-negara maju harus meningkatkan prioritasnya kesektor-sektor kesehatan dan pembukaan peluang ekonomi pada tataran global. Disisi lain ditekankan pula agar PBB mengembangkan upaya-upaya yang lebih baik untuk mengevaluasi efektifitas bantuan kepada negara-negara penerima, dan mendorong negara-negara penerima mengadopsi kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sebenarnya. Sementara terkait

dibubarkan dan seluruh aktivitas dijalankan berdasarkan mandat komisi itu dihentikan. Sependapat dengan Kofi Annan, AS juga mengusulkan pembentukan Dewan HAM.

Adapun mengenai pelucutan senjata, dengan dinyatakan bahwa konferensi mengenai pelucutan senjata sudah tidak berguna dan harus dibubarkan. Amerika Serikat menginginkan sebuah lembaga *ad hoc* dibawah DK untuk menegosiasikan perjanjian tentang pelarangan produksi material senjata nuklir, dan mengembangkan standar internasional untuk *biosecurity*.

Banyaknya kesamaan antara usulan perubahan yang diajukan duta besar AS untuk PBB Jhon Bolton dan masukan-masukan yang dibuat Task force atau gugus tugas itu merupakan rekomendasi dari kongres AS yang merupakan sebagai tempat dan pertimbangan rujukan dari sikap Amerika terhadap proses reformasi PBB. Kembali melihat PBB yang merupakan organisasi yang muncul dari rahim perang dunia II. Setelah menghancurkan hampir seluruh peri kehidupan manusia, PD II berakhir dengan kemenangan pencetus PBB seperti Amerika Serikat dan Inggris. Seiring berjalannya waktu, PBB memasuki babak baru dari struktur politik internasional dengan terus bertambahnya anggota PBB hingga saat ini.

Setelah lama berhadapan dengan kondisi perang dingin yang menakutkan, PBB kini dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan baru yang kompleks. Kondisi ini menuntut pembaharuan dalam PBB bagi kiproahnya menangani persoalan global yang semakin rumit seperti

Penyelesaian konflik dan masalah internasional oleh PBB setelah direformasi nantinya akan mencerminkan perwujudan misi PBB dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan perdamaian dunia.

Politik dunia akhir-akhir ini dihadapkan kepada persoalan kemiskinan, penegakan HAM, lingkungan, demokrasi, dan kemunculan fundamentalisme agama sehingga bermuculan ketakutan yang dirasa harus segera dibenahi. PBB selaku organisasi antar pemerintah berkewajiban mengambil sikap proaktif terhadap persoalan tersebut, kemudian Amerika Serikat dengan kapasitas kekuatan yang mereka miliki juga dihadapkan dengan persoalan serupa dan yang paling sering diangkat sekarang ini adalah perang terhadap terorisme dimana bangsa Amerika mengalami pukulan telak sewaktu serangan teror 11 september yang menjadikan Amerika “emosional”. Paska 11 september, Amerika mengumumkan perang terhadap terorisme. Lebih jauh George W. Bush mengklaim ini adalah perang salib kedua. Afganistan yang mana dikuasai oleh Taliban menjadi sasaran pertama Amerika Serikat waktu itu, dan juga mengumumkan kepada dunia bahwa mereka yang tidak setuju tentang perang terhadap terorisme adalah musuh yang juga harus diperangi. Situasi ini berpengaruh besar terhadap konstalasi politik global, sikap arogansi Amerika Serikat tentu belum berhenti sampai disini saja. Irak dengan rezim Saddam Husein dituding menyimpan senjata pemusnah massal juga mendapat perlakuan yang sama seperti halnya dengan Afghanistan. Dunia internasional menolak sikap Amerika Serikat yang tidak

telah dikesampingkan oleh arogansi Amerika. Kemudian kondisi ini malah menyuburkan terorisme internasional, tidak kurang ledakan-ledakan bom di belahan dunia lainnya terus berlangsung, seperti Indonesia, Spanyol dan Inggris yang baru-baru ini terjadi. Amerika tetap pada pendiriannya bahwa terorisme muncul disebabkan oleh sistem politik otoritarian dan jalan keluarnya adalah demokrasi dunia seperti yang dianut Amerika, merupakan sebuah solusi.

Sementara itu kedudukan PBB selaku organisasi antar pemerintah dinilai tidak mampu lagi memberikan masukan bahkan tidak kuasa menghentikan sikap Amerika Serikat. Melihat dominasi Amerika Serikat di dalam keamanan PBB dan persoalan yang sedang dihadapi Amerika Serikat terlihat ada semacam perjuangan kepentingan Amerika Serikat di PBB. Reformasi yang di usung sekarang ini juga akan melibatkan Amerika sebagai negara anggota tetap, apakah reformasi ini akan memberi kontribusi besar terhadap perubahan politik dunia atau hanya sebuah utopia yang akan mengembalikan kepada dominasi yang sudah dimiliki Amerika Serikat

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut:

“... Amerika Serikat ... dominasi terhadap ...”

D. Landasan Teori

Untuk menganalisa permasalahan diatas penulis menggunakan konsep *power* yang dimiliki Amerika Serikat dalam proses reformasi di PBB. Brown (1997) menuliskan bahwa dalam perspektif kebijakan luar negeri, sebuah negara cenderung mengubah lingkungannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapainya. Dalam hal ini terkandung konsep kepentingan nasional, maka konsep ini juga digunakan penulis dalam membahas dominasi Amerika Serikat terhadap proses reformasi PBB.¹

Reformasi

Dalam kamus politik internasional, Krisna (1993)² mendefinisikan reformasi adalah perubahan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial, politik, atau agama yang terjadi dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam masalah reformasi PBB muncul dari masukan-masukan di saat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, dimana menguatnya wacana reformasi seperti apa yang dikatakan oleh sekjen PBB Kofi Annan “ dunia tidak memberi perhatian cukup terhadap tantangan-tantangan pembangunan....., pada saat yang sama kita kehilangan konsensus atas prinsip mendasar mengenai apa-apa yang mengancam perdamaian dan keamanan, tentang kapan penggunaan kekuatan di benarkan dan siapa seharusnya yang mengizinkan, kemudian mengingatkan Negara berkembang yang belum menikmati hak-hak fundamental, terakhir lebih banyak suara yang perlu didengar dan disimak di PBB, yang perlu

¹ Chris Brown.,, *Understanding International Relations*, London: Macmillan Press Ltd. (1997),hal.

direfleksikan dunia tahun 2005 bukan 1945, Annan setuju, pasti, saya rasa waktunya sudah tiba untuk perubahan besar-besaran lembaga-lembaga untuk komitmen-komitmen baru menghadapi tantangan baru yang lebih luas,”³

Definisi Konsep *Power*

Power adalah konsep yang sangat kompleks yang oleh Brown (1997) menuliskan bahwa konsep *power* memiliki tiga kategori yang saling berkaitan yaitu ⁴

1. *Power* adalah *attribute*. *Power* adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok atau sebuah negara untuk disebarkan ke seluruh dunia.
2. *Power* adalah *relationship*. *Power* adalah kemampuan seseorang, sekelompok atau sebuah negara untuk mempengaruhi pihak lain dalam rangka mencapai tujuannya.
3. *Power* adalah bagian dari struktur dan hal ini lebih mudah diwujudkan dalam dunia nyata. Dalam hubungan internasional *power* sebagai struktur tampak dalam sistem yang diakui sehingga menghasilkan wewenang.

Sementara Henderson (1998) menuliskan *power* adalah konsep yang sukar untuk dipahami, namun perannya sangat penting dalam hubungan internasional. *Power* adalah kemampuan seorang aktor untuk membujuk atau

memaksa pihak lain, sehingga memberikan pengendalian bagi aktor tersebut. *Power* terwujud dalam dua bentuk yaitu *soft* dan *hard*.⁵

Soft power adalah kemampuan untuk membujuk pihak lain agar melakukan sesuatu melalui pengaruh yang dimiliki. Dalam tataran bernegara hal ini dapat terlihat pada ideologi dan kebudayaan yang diikuti oleh negara lain. *Hard power* adalah kemampuan suatu negara untuk memaksakan kehendaknya melalui kekuatan militer atau ekonomi atau kombinasi keduanya (Henderson, 1998).

Power adalah faktor yang sangat penting dalam perpolitikan dunia. Beberapa analis bahkan menyatakan bahwa *power* adalah satu-satunya elemen yang paling penting dalam interaksi dunia. *Power* adalah sumber daya politik yang berubah-ubah dan merupakan total dari semua elemen yang dimiliki suatu negara yang memungkinkannya untuk memenangkan kepentingan nasionalnya di atas kepentingan nasional negara lain (Rourke, 1986).⁶ Senada dengan Morgenthau dan Thompson (1985)⁷ yang menyatakan bahwa *power* adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau pihak tertentu untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang atau pihak lain.

Dengan mendasarkan pada dikotomi *tangible-intangible*, Rourke (1986)⁸ menuliskan elemen dari *power*. Elemen *tangible* adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat dihitung seperti karakteristik fisik,

⁵ Conway W. Henderson, *International Relations: Conflict and Cooperation of The Turn of The 21st Century*, Singapura: Mc.Graw-Hill. (1998), hal. 101

⁶ John. T Rourke, (.), *International Politics on The World Stages*, Hartford: University of Connecticut(1986), hal. 178

⁷ Hans. J. Morgenthau. dan Kenneth. W. Thompson. *Politics Among Nations: The Struggle for*

karakteristik populasi, sumber daya alam, produk industrial, produk pertanian, kemampuan teknologi informasi dan kemampuan militer. Elemen *intangible* adalah semua sumber daya yang dimiliki suatu negara yang tidak dapat dihitung misalnya kekuatan pemerintahan, kekuatan rakyat, persenjataan militer dan reputasi negara tersebut.

Plano dan Olton (1969)⁹ menuliskan sepuluh komponen utama *power* adalah: (i) ukuran, lokasi, iklim dan topografi wilayah suatu negara; (ii) sumber daya alam, sumber energi dan makanan yang dapat diproduksi di negara tersebut; (iii) populasi, ukurannya, kepadatan, komposisi umur dan jenis kelamin dan hubungannya dengan GNP suatu negara; (iv) ukuran dan tingkat efisiensi industri yang berproduksi di suatu negara; (v) ketersediaan dan efektivitas sistem transportasi dan komunikasi; (vi) sistem pendidikan, fasilitas penelitian, jumlah dan kualitas peneliti yang tersedia di negara tersebut; (vii) jumlah, keterampilan perlengkapan dan moral angkatan bersenjata yang dimiliki; (viii) keadaan dan kekuatan politik, ekonomi dan sistem sosial; (ix) kualitas diplomat dan kemampuan diplomasi serta (x) karakter dan moral masyarakatnya.

Coulombus dan Wolfe (1986)¹⁰ juga mengemukakan bahwa untuk memahami konsep *power* adalah dengan menganggapnya sebagai hubungan diantara keinginan yang independen. Dilain pihak cara terbaik untuk mengoperasionalkan dan mengukur kapasitas sebuah negara untuk menjalankan *power* adalah dengan mengkonsentrasikan perhatian pada

⁹ Jack C,Plano, dan Olton, Roy, the international relation dictionary, England clio press ltd (1969), hal. 58

¹⁰ Coulombus dan Wolfe, Introduction to International relations, Power and Justice (1986) 1, 1-66

atribut-atribut spesifiknya yang bisa diukur, “kami menganggap *power* sebagai campuran yang berisikan campuran unsur-unsur persuasi yang berbeda yang dimulai dari koersi militer kepada rangsangan-rangsangan ekonomi sampai kepada solidaritas ideologis dan bujukan-bujukan moral jadi kami mendefinisikan *power* sebagai pegangan konsep yang menunjukkan segala sesuatu yang bisa menentukan dan memelihara kekuasaan aktor A terhadap aktor B”.

Power memiliki tiga unsur penting:¹¹

- Unsur kekuatan (*force*), sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi dan sarana lainnya demi tujuan politik.
- Unsur pengaruh (*influence*), yang didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi dengan menjamin perilaku dan keinginan seperti harapan si penyuruh.
- Unsur Wewenang (*authority*) yaitu kesediaan menerima apa saja yang diperintah oleh pewewenang.

Power ini dapat ditujukan baik dalam ruang lingkup internal yaitu wilayah dan populasi dalam negara maupun lingkup eksternal yang meliputi wilayah dan populasi di luar suatu negara.

Amerika Serikat memainkan peranan penting dalam pembentukan PBB setelah perang dunia II menyadarkan Amerika Serikat pentingnya organisasi internasional global dan keamanan kolektif bagi masa depan

¹¹ *Coulombis and Wolfe, Ibid* hal. 67

stabilitas dunia. Jones.WS (1993)¹² dalam bulan September 1943, parlemen Amerika dengan persetujuan senat, memutuskan : bahwa dengan ini, kongres mendukung pembentukan mekanisme internasional dengan kekuasaan yang memadai untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian yang adil dan kekal seluruh bangsa di dunia; kongres juga mendukung keikutsertaan Amerika Serikat didalamnya melalui proses-proses konstitusionalnya.

Minat Amerika Serikat untuk membentuk PBB terlihat jelas pada dukungannya bagi konferensi Dumbarton Oaks, Mei 1944. Delegasi dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Perancis mempelajari usulan piagam PBB, akhirnya setelah berlangsungnya penjagaan diplomatik selama beberapa tahun, termasuk perjanjian antar negara mengenai hak veto pada konferensi Yalta (Februari 1945), Amerika Serikat menyelenggarakan konferensi San Fransisco (Juni 1945) untuk acara penandatanganan piagam tersebut.

Disimpulkan bahwa *power* Amerika Serikat di PBB berdasarkan defenisi Brown (1997)¹³ sangat besar. Amerika memiliki ketiga komponen *power* yaitu *power* sebagai attribut, kemudian *power* sebagai relationship dan *power* sebagai bagian dari struktur. Hal ini dapat di lihat dari *power* Amerika Serikat sebagai penggagas PBB hingga Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara lain agar terlibat dalam organisasi PBB. Dalam struktur PBB, Amerika Serikat sebagai anggota Dewan Keamanan juga memiliki hak veto sebagai kekuatan untuk menghasilkan suatu wewenang.

¹² Walter S.Jones, Logika Hubungan Internasional, kekuasaan, ekonomi, politik internasional, dan tetapan dunia 2. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama(1993) hal 400

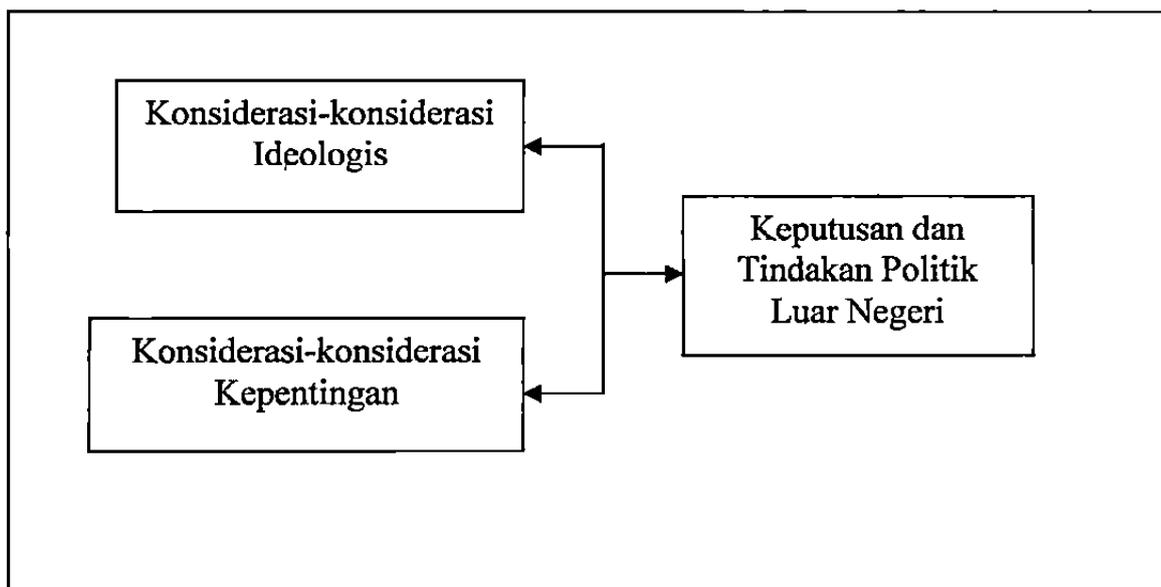
Konsep Kepentingan Nasional

Rourke (1986)¹⁴ menuliskan bahwa kepentingan nasional adalah hal yang membingungkan para ilmuwan bidang politik. Istilah ini sangat sering digunakan oleh pemimpin politik untuk menjelaskan tindakan yang dilakukannya. Ahli politik Perancis berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang sulit untuk didefinisikan secara komprehensif. Pluralitas tujuan yang konkrit dan tujuan pokok menghambat untuk merumuskan definisi rasional dari kepentingan nasional. Meskipun demikian seringkali jika mengatakan kepentingan nasional maka yang kita maksud adalah sasaran yang ingin dicapai oleh negara atau pemerintah yang berkuasa saat ini.

Setiap negara akan merumuskan kepentingannya masing-masing. Dalam menentukannya sangat dipengaruhi oleh percampuran antara pengalaman sejarah, ideologi dan kebutuhan negara saat ini. Seringkali istilah kepentingan nasional ini dimanfaatkan untuk tujuan yang mulia, namun tidak jarang pula disalahgunakan untuk sesuatu yang kurang baik (Rourke, 1986).¹⁵

Sementara Plano dan Olton (1969)¹⁶ menerangkan kepentingan nasional adalah tujuan dasar dan penentu yang menuntun pemimpin negara dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Biasanya kepentingan nasional mencerminkan kebutuhan vital yang dituntut oleh suatu

Kepentingan nasional menurut Coulombis dan Wolfe (1986)¹⁷ lebih baik dilihat sebagai sintesis dari pada pendekatan subjektif dan objektif dimana secara subjektif kepentingan nasional merupakan perjuangan yang berorientasi hasil atau akibat politik sedangkan secara objektif kepentingan nasional merupakan suatu ilmu. Diakui dalam kolektivitas politik yang besar seperti negara setiap keputusan-keputusan pemerintah didesain untuk memajukan kepentingan nasional karena konsep tersebut dipersepsikan oleh para pembuat keputusan, setidaknya keputusan-keputusan tersebut di justifikasi karena berhubungan dengan kepentingan nasional. kemudian perspektif idiologis juga digunakan penguasa negara untuk menentukan kepentingan nasional. Hal ini dapat digambarkan dengan skema berikut ini:



Sumber: Coulombis dan Wolfe (1986)¹⁸

¹⁷ Coulombis dan Wolfe, *op.cit*, hal. 83

Washington akan senantiasa memperbesar wewenang PBB sejauh hal itu mendukung kebijakannya. Ungkapan senada disampaikan Jones W.S. (1993)¹⁹ yang mengutarakan Amerika menyetujui penafsiran status hukum PBB oleh mahkamah internasional bahwa PBB ditetapkan sebagai subjek hukum internasional dengan sejumlah karakteristik seperti karakteristik negara dan sejumlah wewenang penuh atas beberapa fungsi dan tanggung jawab tertentu.

E. Hipotesa

Dominasi Amerika Serikat dalam proses reformasi PBB dikarenakan adanya kekuatan Amerika Serikat baik dalam kapasitas militer maupun ekonomi yang lebih besar daripada negara-negara lain.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis mencoba menganalisa permasalahan dengan menerapkan studi pustaka dari berbagai sumber yang ada, seperti buku-buku referensi, surat kabar, majalah, internet dan beberapa data pendukung lainnya.

G. Tujuan Penulisan

Prospek reformasi PBB menjadi menarik perhatian dunia karena PBB saat ini masih mewakili realitas politik pasca perang dunia II. Organisasi ini masih memberikan kewenangan lebih kepada negara “pemenang perang”

¹⁹ Walter S. Jones, , *op.cit*, hal 408

dalam mekanisme pengambilan keputusan seperti dalam bentuk keanggotaan tetap dan hak veto.

Perubahan konstalasi politik global yang dulunya kurang menjadi perhatian sekarang telah menjadi tantangan bersama seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, terorisme, dan pelanggaran HAM. Termasuk unilateralitas Amerika Serikat akhir-akhir ini telah menjadikan PBB kehilangan “eksistensi” selaku perwakilan negara-negara dunia. Hal ini menjadikan penulis bermaksud menelaah lebih jauh mengenai dominasi Amerika Serikat terhadap proses reformasi yang di canangkan oleh PBB mengingat dominasi Amerika Serikat pasca runtuhnya Uni Soviet, hampir “tidak tersentuh”. Faktor apa saja yang menjadikan Amerika Serikat memiliki dominasi terhadap PBB dan proses reformasi PBB.

H. Batasan Masalah

Untuk memberikan jangkauan yang jelas dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan yang diawali dengan terpilihnya kembali Kofi Annan untuk kedua kalinya sebagai Sekjen PBB yaitu tahun 2001 sampai 2006 sebagai batas penelitian, hal ini dikarenakan isu reformasi merupakan pengaruh dari konstalasi politik global yang menghendaki sistem multilateral yang lebih efektif dan diakhiri sampai KTT dunia 2005

I. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan, didalamnya membahas mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori, hipotesa, metode pengumpulan data, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi tentang gambaran umum tentang PBB, dimulai dengan sejarah singkat berdirinya PBB perkembangan PBB hingga kondisi terkini dan juga membahas operasional PBB sebagai organisasi internasional dan mencantumkan kelemahan struktur dan operasional sehingga memungkinkan untuk di dominasi oleh Amerika Serikat
- Bab III Menggambarkan pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat dalam politik internasional, pandangan Amerika mengenai PBB dan politik internasional. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dan pengaruhnya terhadap kebijakan PBB.
- Bab IV Menggambarkan dominasi Amerika di PBB dimulai dengan deskripsi proses reformasi di PBB. Bukti-bukti dominasi Amerika dalam kebijakan yang diambil PBB. Kemudian hambatan-hambatan dalam proses reformasi PBB dan program reformasi